ANALISIS FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NAGARI DI KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TESIS

Oleh :

FERRY FERDIAN S.STP
NIM. 07202023

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2010

Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman

Oleh : Ferry Ferdian

(Di bawah bimbingan Prof.Dr.Afrizal,MA dan Dr. Erwin, M.Si)

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara persepsi masyarakat terhadap Kebijakan, untuk mengkaji Hubungan antara Kepemimpinan Wali Nagari, untuk menkaji hubungan antara manfaat Pembangunan, Untuk mengkaji Hubungan Tingkat Pendidikan,serta untuk mengkaji hubungan antara persepsi masyarakat terhadap Kebijakan, Kepemimpinan Wali Nagari, manfaat Pembangunan dan Pendidikan secara bersama – sama berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga yang berada dalam Wilayah Kecamatan VII Koto Kabupaten padang Pariaman yang berjumlah 8.048 KK. Sementara yang terpilih menjadi sampel adalah sebanyak 381 KK. Pengambilan Sampel dilakukan dengan Tekhnik Proportional Cluster Random Sampling dan Tekhnis Analisis Data menggunakan Tekhnik Analisis regresi Linear Berganda.

Hasil Analisis deksripsi memperlihatkan bahwa keseluruhan variable masih perlu ditingkatkan karena pencapaiannya masih kurang baik dan cukup baik, bahkan pada Variabel Pendidikan berada Pada kategori Tidak Baik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan terendah berdasarkan asal usul pembentukannya yang relevan dengan budaya local. Karena pemerintah terbawah adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Perubahan Paradigma ini memberikan kekuatan rakyat lokal.

Di Sumatera Barat kembali ke sistim Pemerintahan Nagari dari sisi pemerintah ditujukan untuk melembagakan berbagai potensi sosial untuk dapat berkonstribusi efektif dalam pembangunan nagari melalui kelembagaan formal yaitu pemerintahan nagari sendiri. Kembali ke sistim pemerintahan nagari juga ditujukan untuk kemandirian masyarakat untuk menerima perubahan ini dari sisi sosial, ekonomi dan sosial budaya yang didalamnya termasuk pembiayaan pemerintahan nagari, masalah ekonomi nagari, angkatan kerja konflik ulayat, pendidikan, krisis moral, penataan keagamaan serta adat istiadat dan sebagainya.

Oleh sebab itu prakarsa, partisipasi, semangat keswadayaan serta keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Sumatera Barat. Hal ini sebenarnya

sudah mendarah daging semenjak dahulunya sebagai suatu ikatan yang terangkum dalam suatu nagari. Kehidupan bernagari telah menata kembali hubungan vertikal, horizontal, maupun diagonal dalam suatu dinamika yang unik dan berkelanjutan.

Salah satu tujuan pokok kembali ke sistim pemerintahan nagari adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada masa pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan cendrung dipaksakan karena sentralisasi berbagai kebijakan pemerintahan tentang penyelenggaraan pemerintahaan desa. Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik ke disentralistik memberikan peluang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Dengan demikian, maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari akan meningkat.

Pada Era Orde Baru partisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk pembangunan desa) tidak terlalu menjadi penekan, karena struktur dan proses administrasi pembangunan bersifat sentralistik, Top Down, dan Blue Print dan regulasi penuh. Oleh karena itu kepentingan, masalah, kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat miskin tidak terpenuhi. Apalagi dengan strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang pada kenyataanya akhirnya memperbesar terjadi ketimpangan, yaitu dengan berangkat dari asumsi bahwa penghapusan ketimpangan dengan sendirinya akan tercapai melalui proses yang sering disebut sebagai Trickle Down (rembesan kebawah) (Santoso, 1997)

Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dirubah dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tetap menempatkan salah satunya adalah prinsip peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan daerah dalam rangka mempercepat

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis regresi berganda tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Secara bersama-sama persepsi terhadap kebijakan, kepemimpinan wali nagari, manfaat pembangunan dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil deskripsi variabel persepsi terhadap kebijakan diperoleh skor 3.21 dengan tingkat capaian 64,2 %. Angka ini berada pada Kategori Cukup Baik, kepemimpinan wali nagari diperoleh Skor 3,10 dengan persentase tingkat capaian 62 %. Angka ini berada pada Kategori Cukup Baik, manfaat pembangunan diperoleh skor 3,11 dengan persentase tingkat capaian 62,2 %. Angka ini berada pada Kategori Cukup Baik, rata-rata pendidikan masyarakat di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman adalah tamat SD yang berjumlah 147 orang (38,6 %). Sedangkan untuk yang tidak tamat SD berjumlah 87 orang (22,8 %), diikuti dengan masyarakat yang berpendidikan SLTP berjumlah 82 orang (21,5

DAFTAR PUSTAKA

Anonim (1986) : Pemerintahan Desa : Balitbang Departemen Dalam Negeri.

Anwar. C, 1997, Hukum Adat Indonesia : meninjau hukum adat Minangkabau, Rieneka Cipta, Jakarta.

Arikunto Suharsimi, (1992) *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta.

Asnawi Syofjan, (1999), *Perkembangan Pemikiran Pembangunan Wilayah Pedesaan*, PSI SDALP Universitas Andalas Padang.

Bappeda (2000), *Pola Dasar Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2001-2005*.

BPS, Kabupaten Padang Pariaman, *Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2007*

Combs. and Ahmed. M, 1985. *Memerangi Kemiskinan Pedesaan melalui Pendidikan Non Formal* (Terjemahan), CV. Rajawali, Jakarta.

Dasril, (2004), *Penguatan Kepemerintahan Nagari di Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman*, YPDS-Amanah Bunda, Solok.

Davis. Keith, 1962. *Human Relation at Work*, New York. Mc. Graw Hill Book Boy.

D.C. Korten & Sjahrir (1988), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

H. Asriadi (2005), *Analisa Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pendidikan Pada tingkat SMP di Kabupaten Padang Pariaman*, thesis UNP, Padang.

Islamy, M. Arfan, 1999. *Kebijakan Publik* (Modul), Pusat Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Madrie, 1986. *Beberapa Faktor Penentu Partisipasi Anggota Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan*, IPB. Bogor.

Mubyarto dan Kartodirjo. S, (1988), *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.

Muklis. R (2003), *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Irigasi Anai Phase I di Kabupaten Padang Pariaman*, thesis MM UNP Padang.